

# Hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia

Muhammad faris

Prodi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [250501110050@student.uin-malang.ac.id](mailto:250501110050@student.uin-malang.ac.id)

## Kata Kunci:

Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, masyarakat Indonesia, penegakan HAM, Pancasila.

## Keywords:

Human Rights, social justice, Indonesian society, human rights enforcement, Pancasila.

## ABSTRAK

Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial merupakan dua hal penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keduanya memiliki hubungan yang erat karena pelaksanaan HAM bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini membahas bagaimana penerapan HAM dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta kaitannya dengan keadilan sosial yang menjadi dasar dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, peraturan perundang-

undangan, dan data dari lembaga terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, serta lemahnya perlindungan hukum bagi sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan keadilan sosial belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Dalam hal ini, pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga, melindungi, dan menegakkan HAM agar tercipta kehidupan yang lebih adil dan seimbang. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara negara dan masyarakat untuk mewujudkan penghormatan terhadap HAM serta meningkatkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

## ABSTRACT

Human Rights and social justice are important elements in the life of Indonesian society. Both are closely connected because the protection of human rights aims to create a fair, peaceful, and prosperous life for all citizens. This study discusses the implementation of human rights in Indonesia and its relationship with social justice as reflected in Pancasila and the 1945 Constitution. The writing method used in this study is a qualitative approach through library research by examining books, academic journals, laws, and data from related institutions. The discussion shows that the application of human rights in Indonesia still faces many challenges, including social inequality, discrimination, poverty, unequal access to education, and limited legal protection for certain groups in society. These conditions indicate that social justice has not been fully achieved equally among the people. Therefore, the government, legal institutions, and society have an important role in protecting and enforcing human rights to create a more balanced and fair social life. Cooperation between the state and the community is needed to strengthen respect for human rights and improve social justice in Indonesia.

## Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun. HAM menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan langsung dengan hak untuk hidup, memperoleh perlindungan, mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, serta



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam kehidupan bernegara, keberadaan HAM menjadi salah satu dasar untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Oleh sebab itu, setiap negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.(Zein, 2025)

Di Indonesia, hak asasi manusia mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan prinsip-prinsip pancasila, terutama sila kelima yang mengandung makna "keadilan sosial bagi semua warga negara indonesia". Sila ini menekankan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya dalam menjaga ketertiban. Tetapi juga bertugas menciptakan kondisi yang adil bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, kelompok, maupun tingkat sosial. Di samping itu, perlindungan hak asasi manusia juga telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya bagi pasal 28A hingga pasal 28J yang mencakup berbagai hak fundamental bagi warga negara. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia memiliki peranan signifikan dalam sistem hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia.

Meskipun demikian, pelaksanaan HAM dan keadilan sosial di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Dalam kehidupan masyarakat, masih ditemukan ketimpangan sosial, kemiskinan, diskriminasi, kekerasan, konflik agraria, serta permasalahan hukum yang menunjukkan bahwa keadilan belum dirasakan secara merata. Sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan, pekerjaan, maupun perlindungan hukum. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan HAM belum sepenuhnya berjalan secara optimal dalam kehidupan sehari-hari.(Warokhmah, 2025)Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi juga membawa pengaruh terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Di satu pihak, kemajuan teknologi membuat masyarakat lebih mudah untuk mengakses informasi dan mengungkapkan pendapat. Akan tetapi, di sisi lainnya, timbul berbagai tantangan baru seperti penyebaran kata-kata kebencian, pelanggaran privasi, diskriminasi di platform media sosial, dan konflik yang muncul akibat perbedaan sudut pandang. Ini menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia perlu diadaptasi secara terus-menerus dengan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.

Selain itu, masalah keadilan sosial masih menjadi perhatian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan kondisi ekonomi, akses pendidikan, pembangunan daerah, serta kesempatan kerja menyebabkan munculnya kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat tertentu. Dalam beberapa kasus, masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lemah sering kali mengalami keterbatasan dalam memperoleh hak-haknya. Oleh karena itu, keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan dan pemerataan kehidupan masyarakat.Keberadaan lembaga seperti Komnas HAM menjadi salah satu bentuk upaya negara dalam menjaga dan menegakkan HAM di Indonesia. Lembaga tersebut memiliki tugas untuk menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan, serta membantu penyelesaian berbagai persoalan HAM. Namun, upaya penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara saja, melainkan juga membutuhkan kesadaran masyarakat untuk saling menghormati hak satu sama lain dalam kehidupan sosial.(Siraja, 2025)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah elemen krusial dalam kehidupan individu, sebab setiap orang berhak atas kehidupan, mendapatkan perlindungan, menerima pendidikan, pekerjaan, serta diperlakukan secara adil. Dalam kehidupan bernegara, HAM menjadi berfungsi sebagai fondasi untuk membangun interaksi sosial yang aman, damai, dan saling menghargai. Di Indonesia, keberadaan HAM tidak dapat dipisahkan dari nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak yang harus dihormati. Oleh karena itu, perlindungan terhadap HAM menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Keadilan sosial juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Keadilan sosial berarti setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh hak, kesejahteraan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan perlakuan. Dalam sila kelima Pancasila dijelaskan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum merasakan keadilan secara merata. Perbedaan kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, pembangunan daerah, dan kesempatan kerja sering menimbulkan kesenjangan sosial di tengah masyarakat. Perkembangan teknologi dan media sosial juga memengaruhi terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. Masyarakat kini memiliki akses yang lebih mudah untuk mengungkapkan pendapat dan mendapatkan informasi, namun di sisi lain muncul berbagai masalah seperti penyebaran kebencian, perundungan di media sosial, dan pelanggaran privasi. Situasi ini mencerminkan bahwa tantangan dalam menjaga Hak Asasi Manusia semakin kompleks seiring dengan perubahan waktu. Oleh karena itu, pemahaman tentang Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial sangatlah krusial agar masyarakat dapat menghargai hak orang lain dan menjaga kehidupan.

Berdasarkan kondisi tersebut, pembahasan mengenai HAM dan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia perlu dikaji lebih dalam. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana hak asasi manusia diterapkan di Indonesia, mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam merealisasikan keadilan sosial, serta mengetahui langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan, aman, dan sejahtera.

### **Rumusan Masalah**

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pelaksanaan Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan ketimpangan sosial, perlindungan hukum, serta pemenuhan hak dasar masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan dalam penulisan ini difokuskan pada bagaimana pelaksanaan HAM dalam kehidupan masyarakat Indonesia, bagaimana hubungan antara HAM dan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, pembahasan ini juga mengkaji upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menjaga serta menegakkan HAM agar tercipta kehidupan sosial yang lebih adil dan seimbang.

## Tujuan Penelitian

Penulisan ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam kehidupan masyarakat Indonesia serta mengetahui hubungan HAM dengan keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang masih terjadi dalam pelaksanaan HAM dan keadilan sosial di Indonesia, seperti ketimpangan sosial, diskriminasi, dan kurangnya perlindungan terhadap hak masyarakat. Melalui pembahasan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya menghormati HAM serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan kehidupan yang lebih adil, aman, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Pembahasan

### Pengertian Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial

Hak Asasi Manusia atau HAM berawal dari keyakinan bahwa semua manusia diciptakan oleh tuhan dan sederajat. Manusia dilahirkan dengan martabat dan hak yang sama. Atas dasar ini, manusia harus diperlakukan sama dan beradab. HAM bersifat universal, maksudnya dapat di implementasikan pada semua manusia tanpa membedakan ras, kepercayaan, ras, dan multientnis. Dalam hal hak asasi manusia atau hsm, cakupannya sangat luas, baik itu hak asasi individu dan komunitas atau kolektif atau komunikasi. Meski baru terlihat jelas di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, semenjak berakhirnya perang dunia II dan semakin intensif semenjak akhir abad ke-20, upaya implementasinya telah di realitaskan selama ratusan tahun. Banyak juga dokumen dalam konteks ini yang terus meningkat dari waktu ke waktu (Faslah, 2025)

Di Indonesia, HAM telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28A sampai Pasal 28J. Selain itu, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan berbagai hak dasar warga negara dan kewajiban negara dalam melindungi HAM. Keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap perlindungan hak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Lestari, 2024) Sementara itu, keadilan sosial merupakan kondisi ketika seluruh masyarakat memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang sama dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial tidak hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga berhubungan dengan kesejahteraan, pendidikan, ekonomi, dan pemerataan pembangunan. Dalam sila kelima Pancasila disebutkan bahwa keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Artinya, setiap masyarakat memiliki hak untuk hidup layak dan memperoleh kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi. HAM dan keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Pelaksanaan HAM yang baik akan membantu terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat. Sebaliknya, jika HAM tidak dihormati, maka ketidakadilan sosial akan mudah terjadi. Oleh karena itu, perlindungan HAM menjadi salah satu langkah penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera.

## **Dasar Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Perlindungan terhadap hak asasi manusia di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat. Negara Indonesia menempatkan hak asasi manusia sebagai komponen penting dalam tatanan hukum dan kehidupan berbangsa. Ini bisa dilihat dalam pembukaan UUD 1945 yang menekankan bahwa tujuan negara adalah melindungi seluruh warga negara Indonesia dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu, pasal 28A hingga pasal 28J UUD 1945 merincikan berbagai hak dasar manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk beribadah, hak untuk menyampaikan pendapat, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain UUD 1945, pemerintah juga membentuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan tanpa diskriminasi. Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM masyarakat. (Anggraini, 2025)

Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang bertujuan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Pembentukan pengadilan HAM menunjukkan bahwa negara berusaha memberikan perlindungan hukum terhadap korban pelanggaran HAM dan memberikan hukuman kepada pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain aturan nasional, Indonesia juga ikut dalam beberapa kerja sama internasional yang berkaitan dengan HAM. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya menjadi perhatian dalam lingkup nasional, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional.

## **Pelaksanaan Hak Asasi Manusia dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia**

Pelaksanaan HAM dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, hukum, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam bidang pendidikan, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun daerah tempat tinggal. Pemerintah telah menjalankan berbagai program pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan daerah terpencil. Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, dan rendahnya akses teknologi pendidikan.

Dalam bidang hukum, setiap warga negara memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat masyarakat yang merasa kesulitan mendapatkan keadilan. Perbedaan kondisi ekonomi sering memengaruhi kemampuan seseorang dalam memperoleh bantuan hukum. Selain itu, masih ditemukan tindakan kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat kecil. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan HAM di bidang hukum masih perlu diperbaiki agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Di bidang ekonomi, HAM berkaitan dengan hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, bantuan sosial, dan penyediaan lapangan kerja. Namun kesenjangan ekonomi masih menjadi masalah yang cukup besar di Indonesia. Sebagian masyarakat memiliki akses ekonomi yang baik, sedangkan sebagian lainnya masih hidup dalam kondisi kemiskinan dan keterbatasan. Ketimpangan tersebut dapat memengaruhi pelaksanaan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. (Yunita et al., 2024)

Dalam bidang sosial dan politik, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ikut dalam kegiatan organisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. Perkembangan teknologi dan media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun di sisi lain, media sosial juga sering menjadi tempat munculnya ujaran kebencian, penyebaran berita palsu, diskriminasi, dan konflik akibat perbedaan pandangan. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat harus disertai dengan tanggung jawab agar tidak merugikan hak orang lain.

### **Permasalahan HAM dan Keadilan Sosial di Indonesia**

Walaupun Indonesia telah memiliki aturan yang cukup lengkap mengenai HAM, kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ketimpangan sosial. Perbedaan kondisi ekonomi, pendidikan, dan pembangunan menyebabkan sebagian masyarakat belum merasakan kesejahteraan secara merata. Ketimpangan tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan dalam kehidupan sosial. Selain itu, diskriminasi juga masih menjadi persoalan dalam kehidupan masyarakat. Diskriminasi dapat terjadi karena perbedaan agama, suku, gender, kondisi ekonomi, maupun latar belakang sosial tertentu. Tindakan diskriminasi menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan memperoleh hak yang seharusnya dimiliki. Dalam kehidupan masyarakat yang beragam seperti Indonesia, sikap saling menghormati sangat penting untuk menjaga persatuan dan menciptakan keadilan sosial. Konflik agraria juga menjadi salah satu persoalan yang berkaitan dengan HAM dan keadilan sosial. Sengketa lahan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil. Dalam beberapa kasus, masyarakat kehilangan hak atas tanah dan tempat tinggal yang menjadi sumber kehidupan mereka. Hal tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan kebijakan yang adil dalam menyelesaikan konflik sosial di masyarakat. (Hamidah, 2023)

### **Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Menegakkan HAM dan Keadilan Sosial**

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga dan menegakkan HAM di Indonesia. Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah adalah membuat aturan hukum yang melindungi hak masyarakat dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pelayanan pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesejahteraan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh masyarakat. Keberadaan Komnas HAM menjadi salah satu upaya negara dalam menangani persoalan HAM. Lembaga tersebut bertugas menerima pengaduan masyarakat, melakukan pengawasan, dan membantu penyelesaian kasus HAM. Selain

Komnas HAM, lembaga hukum dan aparat penegak hukum juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keadilan dan melindungi masyarakat dari tindakan yang melanggar HAM.

Namun penegakan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan sosial yang adil dan harmonis. Sikap saling menghormati, tidak melakukan diskriminasi, menjaga toleransi, dan menghargai perbedaan merupakan bagian dari upaya menjaga HAM dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM akan membantu menciptakan lingkungan sosial yang aman dan damai. Selain itu, pendidikan mengenai HAM perlu ditanamkan sejak dini agar masyarakat memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sosial. Dengan adanya pendidikan HAM, masyarakat diharapkan mampu menghormati hak orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan sesama. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

### **Upaya Mewujudkan HAM dan Keadilan Sosial di Indonesia**

Mewujudkan HAM dan keadilan sosial memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penegakan hukum secara adil tanpa membedakan status sosial maupun kondisi ekonomi masyarakat. Penegakan hukum yang adil akan membantu menciptakan rasa aman dan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Selain itu, pemerataan pendidikan dan pembangunan juga menjadi langkah penting dalam menciptakan keadilan sosial. Pemerintah perlu memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, memperoleh akses pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Dengan adanya pemerataan pembangunan, kesenjangan sosial dalam masyarakat dapat dikurangi.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial. Penyediaan lapangan kerja, bantuan sosial, dan pemberdayaan masyarakat dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin juga perlu diperhatikan agar mereka memperoleh hak yang sama dalam kehidupan sosial. (Nurdin, 2022) Di era digital saat ini, masyarakat juga perlu menggunakan teknologi dan media sosial secara bijak. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat harus tetap menghormati hak orang lain dan tidak digunakan untuk menyebarkan kebencian maupun diskriminasi. Dengan sikap yang saling menghargai, kehidupan masyarakat yang damai dan adil dapat lebih mudah diwujudkan.

### **Kesimpulan dan Saran**

Hak Asasi Manusia dan keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. HAM memberikan perlindungan terhadap hak dasar setiap manusia, sedangkan keadilan sosial bertujuan menciptakan kehidupan yang seimbang, layak, dan adil bagi seluruh masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan

bernegara, kedua hal tersebut menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keamanan, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Indonesia sendiri telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat mengenai HAM melalui Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan berbagai peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak masyarakat.

Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat dalam menjaga serta menegakkan HAM di Indonesia. Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum yang adil, memperluas pemerataan pendidikan dan kesejahteraan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kelompok masyarakat yang rentan. Di sisi lain, masyarakat juga perlu meningkatkan sikap saling menghormati, menjaga toleransi, serta menghargai hak orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya kesadaran bersama dan upaya yang berkelanjutan, pelaksanaan HAM dan keadilan sosial di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih baik sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai, adil, dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Anggraini, Y. (2025). Hak Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia Dan Pelanggarannya Dalam Kasus Penyiksaan Andhika Lutfi Falah. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 12–15. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jkhpk%0A>
- Faslah, R. (2025). Pancasila sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. Malang: UIN Maliki Pres. <https://repository.uinmalang.ac.id/24376>
- Hamidah, N. A. (2023). Penegakan HAM di Era Modernisasi. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 02(06), 459–463. <https://wnj.westscience-press.com/index.php/jhhws/index>
- Lestari, S. I. (2024). Implikasi Hukum Masyarakat Dalam Penegakan Keadilan Sosial di Era Modern: Studi Kasus Putusan Nomor 93/Puu-Xx/2022. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, 647–658. <https://doi.org/https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9131>
- Nurdin, N. (2022). *HAM, GENDER DAN DEMOKRASI (sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*. CV. Sketsa Media.
- Siraja, A. (2025). TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP KEWAJIBAN IZIN PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL (Studi PP No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil) (Issue 45). Universitas Islam Negeri Malang.
- Warokhmah, N. S. (2025). Harmonisasi pancasila dan hak asasi manusia dalam menjaga persatuan bangsa. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 652–657.
- Yunita, S., Mardiah, A., Manurung, D. A., Mutia, D. Q., Elisabet, M. R., Mustasfa, S. W., & Baringbing, S. J. (2024). PERANAN HUKUM DALAM PENEKAKAN HAK ASASI MANUSIA ( HAM ) DI ERA DIGITAL. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7, 16726–16731.
- Zein, R. D. (2025). Permasalahan pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 3, 464–469.